

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan “*Bridging social capital* (Modal Sosial *Bridging*) Pemuda pada Organisasi Kingkilaban dalam Meningkatkan Perekonomian dan Ketahanan Pangan Masyarakat” pada aspek *bridging social capital*. Penelitian pertama yang berjudul “Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Jimbaran” oleh Fitra, F.S, dkk pada tahun 2021 memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terkait isu perekonomian masyarakat desa yang lemah serta mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam. Penelitian kedua yang berjudul “Kampung Hijau: Bonding and *Bridging social capital* in Developing Sustainable Local Tourism” oleh Mutiani, dkk pada 2022 berkaitan dengan modal sosial, yaitu social bonding dan social *bridging* yang menjadi kunci dalam pengembangan wisata turis lokal yang berkelanjutan. Penelitian ketiga dengan judul “Menggerakkan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” oleh Fitriyani, Yuli, dkk pada tahun 2018 mengenai pergerakan ekonomi desa melalui BUMDes dengan partisipasi masyarakat desa. Penelitian keempat berjudul “Modal Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Pariwisata (Kasus Daerah Obyek Wisata Colo Kabupaten Kudus)” oleh Syahriar, Galang Hendry dan Darwanto yang membahas mengenai pemanfaatan modal sosial dalam pengembangan ekonomi pariwisata.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Ringkasan Isi dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Social Capital dalam Kewirausahaan Lokal: Kajian Keterlibatan Masyarakat dalam Usaha Pariwisata di Delha Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur oleh Ciptosari, dkk. (2019)	Sebagai aset nonmaterial, modal sosial sangat berperan dalam mendukung usaha kecil ketika bentuk modal lainnya terbatas dan tidak dapat dijangkau. Wirausaha lokal perlu mengakses modal sosial sebagai strategi dan sarana untuk membangun jaringan dan memperoleh dukungan sosial dalam upaya mengembangkan usaha.	<i>Bridging social capital</i> yang juga merupakan salah satu bentuk modal sosial turut menjadi fokus penelitian Ciptosari, dkk, dalam melihat bagaimana peningkatan ekonomi di Delha.	Modal sosial bukan menjadi topik utama pada penelitian Ciptosari, dkk. Penelitian melihat bagaimana ketiga bentuk modal sosial berperan dalam membantu usaha-usaha kecil lokal dan upayanya dalam meningkatkan perekonomian di Delha..
Kampung Hijau: Bonding and <i>Bridging social capital</i> in Developing Sustainable Local Tourism oleh Mutiani, dkk. (2022)	Penelitian tentang modal sosial <i>bonding</i> dan <i>bridging</i> yang dilakukan di Kampung Hijau bertujuan untuk meneliti bagaimana dua bentuk modal sosial tersebut dapat meningkatkan perekonomian melalui aktivitas Kampung Hijau.	Penelitian yang dilakukan oleh Mutiani, dkk melihat peran dua bentuk modal sosial, yaitu <i>bonding</i> dan <i>bridging social capital</i> yang dimiliki oleh masyarakat, pemerintah lokal, serta turis. Modal sosial <i>bridging</i> dilihat dari berbagai upaya kerja sama, khususnya antar masyarakat pada wilayah Kampung Hijau.	Penelitian tentang Kampung Hijau tidak hanya fokus pada modal sosial <i>bridging</i> , melainkan juga modal sosial <i>bonding</i> , sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya mengkaji bagaimana <i>social bridging</i> dalam organisasi kepemudaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

<p>Pengentasan Orang Miskin di Indonesia: Peran Modal Sosial yang Terlupakan oleh Yamin, Sofyan, dan Teguh Dartanto (2019)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan modal sosial melalui ikatan <i>bonding</i> dan <i>bridging</i> bermakna penting terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia di samping faktor modal manusia (pendidikan) dan modal fisik (aset atau kredit). Modal sosial <i>bonding</i> berguna sebagai dukungan sosial atau jaminan keamanan bagi rumah tangga miskin ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Jalinan kepercayaan antara rumah tangga miskin yang terbentuk mampu mempertahankan kedalaman kemiskinan rumah tangga miskin agar tidak jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan modal sosial <i>bridging</i> berpotensi untuk menurunkan kedalaman kemiskinan dan juga berpotensi bagi rumah tangga miskin untuk keluar sepenuhnya dari garis kemiskinan. Namun pemanfaatan modal sosial</p>	<p>Pada penelitian Yamin, Sofyan, dan Teguh Dartanto, <i>bridging social capital</i> dilihat sebagai kunci dalam mengatasi kemiskinan melalui penyebarluasan jaringan sehingga <i>bridging social</i> harus menjadi perhatian di samping <i>bonding social capital</i> untuk mengentaskan kemiskinan melalui upaya penyebarluasan jejaring.</p>	<p>Masalah sosial berupa kemiskinan menjadi pembahasan dalam penelitian Yamin, Sofyan, dan Teguh Dartanto dalam mengkaji sejauh mana modal sosial <i>bonding</i> dan <i>bridging</i> berperan. Penelitian dilakukan dengan menguji berbagai aspek, seperti: pendidikan, kredit, status perkawinan, serta umur bagi dampaknya pada modal sosial <i>bonding</i> dan <i>bridging</i>.</p>
--	---	---	--

	<p><i>bridging</i> memiliki kesulitan karena adanya <i>social barrier</i> (hambatan sosial) berupa perbedaan status, kesukuan, atau permasalahan bahasan, sehingga <i>social barrier</i> yang ada harus turut menjadi perhatian.</p>		
<p>Identifikasi dan Analisis Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara oleh Pontoh, Otniel (2010)</p>	<p>Penelitian mengenai identifikasi analisis modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Gangga memperoleh hasil bahwa budaya yang tertutup pada masyarakat Desa Gangga mampu membangun <i>bonding social capital</i> yang kuat atas dampak dari homogenitas profesi, yaitu nelayan. Modal sosial <i>bonding</i> yang sangat kuat tersebut mendukung sistem perekonomian nelayan di Desa Gangga yang juga terjalin kuat karena para nelayan menolak teknik maupun sistem penangkapan ikan dari luar.</p>	<p>Peneliti menganalisis modal sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Gangga Dua, Kabupaten Minahasa, agar dapat mengetahui bagaimana modal sosial mampu menjadi dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat nelayan.</p>	<p>Modal sosial dikaji dengan berbagai aspek, seperti tingkat pendapatan, politik lokal desa, serta pola produksi dan reproduksi. Peneliti bukan hanya fokus pada modal sosial, utamanya <i>bridging social capital</i>, melainkan bagaimana modal sosial dapat menjadi sarana dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.</p>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang modal sosial yang telah dikaji oleh peneliti secara umum membahas tentang bagaimana dua bentuk modal sosial, yaitu *bonding* dan *bridging social capital* memiliki andil dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi. Pada penelitian Ciptosari, dkk berjudul Social Capital dalam Kewirausahaan Lokal: Kajian Keterlibatan Masyarakat dalam Usaha Pariwisata di Delha Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur memberikan hasil bahwa modal sosial berperan dalam mendukung usaha kecil warga masyarakat sebagai aset nonmaterial. Usaha-usaha kecil sampai menengah yang dibentuk oleh masyarakat oerlu membangun jejaring sehingga dapat memperoleh berbagai dukungan untuk mengembangkan usaha. Penelitian Dartanto, Teguh, dkk juga menghasilkan kesimpulan bahwa *bridging social capital* merupakan salah satu kunci bagi masyarakat untuk terhindar dari kemiskinan dengan cara memperluas jejaring dengan masyarakat dengan status sosial lebih tinggi. Penelitian dengan hasil serupa juga diperoleh dari penelitian Mutiani tentang bagaimana *bonding* dan *bridging social capital* mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui aktivitas Kampung Hijau bersama dengan *bonding social capital* yang memperkuat pengelolaan Kampung Hijau dengan kekompakan warga masyarakat.

Ketiga penelitian yang telah disebutkan memberikan pernyataan bahwa *bridging social capital* merupakan kunci yang harus dimiliki masyarakat dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik, utamanya melalui bidang

ekonomi baik dari segi usaha kecil dan menengah serta pariwisata. *Bridging social capital* yang dimiliki masyarakat memiliki kelebihan pada kesempatan memperluas jaringan dengan berbagai pihak dengan perbedaan status dan tingkatan ekonomi maupun perbedaan budaya. Hal tersebut mampu memungkinkan adanya pertukaran informasi, ide, serta pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya pada *bridging social capital* yang dimiliki warga pengelola Kampung Hijau dengan turis yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang sebaiknya ditingkatkan dalam pengelolaan Kampung Hijau melalui informasi para turis.

*Bridging social capital* bukan merupakan aset yang dengan mudah dapat diperoleh masyarakat. *Bridging social capital* juga memiliki hambatan sendiri dalam pemanfaatannya. Hal tersebut berdasarkan hasil dari penelitian Dartanto, Teguh, dkk yang menemukan adanya *social barrier* (hambatan sosial) pada pemanfaatan *bridging social capital* dalam pengentasan kemiskinan. *Social barrier* tersebut berupa status, kesukuan, serta perbedaan tujuan. Selain adanya hambatan dalam pemanfaatan *bridging social capital*, hasil dari penelitian Pontoh, Otniel memberikan hasil bahwa *bridging social capital* akan sulit dibangun apabila masyarakat memiliki *bonding social capital* yang kuat dan didukung oleh budaya masyarakat yang tertutup dalam artian tidak bersedia menerima dan menyerap budaya dari luar daerah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan peneliti mengenai bagaimana *bridging social capital* pada organisasi pemuda Kingkilaban fokus pada bagaimana

*bridging social capital* dapat membantu organisasi pemuda Kingkilaban meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Balewangi melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Berbagai penelitian mengenai modal sosial, utamanya pada bentuk *bridging social capital* pada umumnya memberikan hasil bahwa apabila terdapat *bridging social capital* yang dibangun dengan baik, maka dapat berdampak pada peningkatan di berbagai bidang dalam masyarakat, seperti: ekonomi, sosial, dan pendidikan serta pengetahuan. Berbagai perbedaan status, ras, serta budaya dilihat sebagai suatu aset dan sumber daya untuk meningkatkan sumber daya milik organisasi serta merupakan kesempatan untuk mengelola perbedaan menjadi salah satu kesempatan (*opportunity*) bagi organisasi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji dan dipelajari peneliti dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian dengan topik yang akan dibahas mengenai *bridging social capital* pada organisasi pemuda desa dalam meningkatkan perekonomian. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian *Bridging Social Capital* pada Organisasi Kepemudaan Kingkilaban dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut adalah sebagai berikut.

2.1.1 Penelitian-penelitian yang peneliti temukan pada berbagai jurnal dan tulisan ilmiah mayoritas membahas mengenai modal sosial secara keseluruhan, belum terdapat penelitian yang fokus pada *bridging social capital*. *Bridging social capital* menjadi fokus penelitian karena

peneliti dapat mengkaji lebih dalam bagaimana relasi para pemuda Kingkilaban dengan pihak desa dan tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan perekonomian melalui program pengelolaan sapi perah.

2.1.2 Penelitian tentang *bridging social capital* pada organisasi kepemudaan Kingkilaban dilakukan dengan berpedoman pada teori Bram Lancee yang menganalisis *bridging social capital* dari dua aspek, yaitu aspek struktural dan aspek kognitif.

2.1.3 Penelitian tentang modal sosial, terutama *bridging social capital*, tentang organisasi masih belum banyak dibahas. Mayoritas penelitian modal sosial yang peneliti temukan adalah tentang desa wisata, pedagang, dan manfaat modal sosial pada proses pembelajaran dan sebagainya. Belum terdapat penelitian tentang organisasi dan relasi dengan pihak desa maupun tokoh masyarakat.

## 2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

### 2.2.1 Modal Sosial

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa tidak mungkin masyarakat, secara individual, menangani berbagai masalah tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari masyarakat lainnya. Pemikiran inilah yang mengilhami seorang pendidik berkebangsaan Amerika bernama Lyda Judson Hanifan pada awal abad ke-20 yang kemudian memperkenalkan konsep modal sosial untuk pertama kali. Dalam tulisannya yang berjudul “The Rural School Community Center”, Hanifan mengemukakan bahwa modal sosial bukanlah modal dalam pengertian biasa,



seperti kekayaan atau uang, melainkan modal metaforis yang merupakan aset nyata yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep modal sosial yang diperkenalkan Hanifan bahwa modal sosial mengandung niat baik, persahabatan, rasa simpati, dan hubungan sosial serta kerja sama yang erat antar individu dan keluarga yang membentuk kelompok sosial.

Penemuan Hanifan tentang konsep awal modal sosial berkembang Pendidikan yang berkualitas sangat berperan besar dalam menentukan kualitas individu ataupun masyarakat bangsa secara keseluruhan. Di sini perlu mendudukan pendidikan sebagai sebuah nilai yang tumbuh di masyarakat. Jika nilai pengetahuan begitu dominan dalam setiap gerak masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan berjuang untuk menuntut ilmu tanpa mengenal kata berhenti. Hal tersebut merupakan cikal bakal terbangunnya semangat toleransi, keinginan untuk saling berbagi (*reciprocity*) dan semangat kemanusiaan untuk membangun keselamatan, muncul perasaan berharga (*sense of efficacy*), merangsang keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang lain (*networking*) dan saling mempercayai (*trust*).

Modal sosial semakin berkembang seiring dinamika perkembangan zaman. Para ahli mengembangkan banyak teori mengenai modal sosial berangkat dari berbagai kasus di banyak wilayah di dunia. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti ahli membuktikan bahwa modal sosial memiliki peran besar dalam mencapai keberhasilan ekonomi masyarakat.

### 2.2.1.1 Teori Modal Sosial

#### 1. Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu merupakan seorang sosiolog Prancis yang memiliki pandangan mengenai modal sosial dalam pokok pembahasan tentang besar kecil pemanfaatan modal sosial bergantung kepada kemampuan masing-masing individu yang menjadi bagian dari sebuah kelompok sosial. Dari penjelasan singkat mengenai modal sosial pada pemahaman Bourdieu fokus pada hierarkis sosial. Individu sebagai anggota suatu kelompok sosial diharapkan mampu mengembangkan kapasitas modal sosial yang dimiliki melalui kualitas dan kuantitas jaringan serta relasi yang dimiliki dalam kelompok.

Modal sosial adalah jumlah sumber daya aktual atau maya yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitutionalkan (Bourdieu dalam Field, 2018). Bourdieu menekankan modal sosial sebagai sebuah sumber daya yang dapat diupayakan besaran dan kualitasnya melalui jaringan yang dapat dikembangkan.

Bourdieu menyoroti terdapat tiga elemen utama dalam modal sosial antara lain sebagai berikut.

- a. Sumber daya (*Resources*)
- b. Jaringan (*Network*)
- c. Relasi

Modal sosial dapat dinilai sebagai aset dan sumber daya yang dapat diperoleh individu sebagai aktor dalam lingkungan sosial melalui berbagai jaringan dan relasi. Sumber daya yang diperoleh kemudian dapat dioperasikan untuk

mendapatkan berbagai keuntungan, misalnya dalam hal ini keuntungan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini dikarenakan modal sosial dapat dikonversi menjadi modal dalam bentuk lain, misalnya dalam memperoleh keuntungan ekonomi sebagai hasil dari meluasnya jaringan dan relasi yang saling menguntungkan (*reciprocal relationships*).

Jaringan diperlukan untuk memperluas kemungkinan individu sebagai aktor dalam memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya melalui modal sosial. Kekuatan dan kebermanfaatan modal sosial ditentukan oleh seberapa banyak jaringan yang dapat dibangun oleh individu di dalam kelompoknya. Bourdieu memberikan kesimpulan bahwa nilai dari jaringan dapat besar atau kecil tergantung pada jumlah koneksi yang dapat dimobilisasi dan volume modal (ekonomi, sosial, budaya) yang dimiliki masing-masing koneksi (Bourdieu dalam Field, 2018).

Hubungan-hubungan yang saling menguntungkan dapat mendasari terbentuknya modal sosial yang kuat dalam kelompok. Hubungan timbal balik yang baik tersebut berupa relasi yang kemudian memiliki andil dalam memperkuat sumber daya yang dapat diperoleh oleh anggota kelompok. Relasi ideal yang dibangun hendaknya ikatan hubungan yang di dalamnya terdapat tindakan saling memberi perhatian (*mutual acquaintance or recognition*) yang dilakukan oleh para aktor dalam kelompok sosial.

Bourdieu cenderung melihat modal sosial sebagai aset individualistis. Modal sosial dinilai sebagai aset milik para aktor yang berkedudukan istimewa berdasarkan perolehan sumber daya yang besar. Modal sosial tersebut kemudian

menjadi sarana untuk mempertahankan atau meningkatkan superioritas mereka. Dalam teorinya mengenai modal sosial, Bourdieu juga menjelaskan teori ruang sosial (*social spaces*) sebagai entitas kehidupan yang ditandai oleh sebaran posisi-posisi aktor dalam hierarki perolehan modal sosial.

## 2. James Coleman

James Coleman merupakan seorang sosiolog Amerika yang memberikan perhatian kepada modal sosial dilatarbelakangi oleh penelitian tentang prestasi pendidikan di lingkungan kumuh di Amerika. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa modal sosial tidak hanya dapat dimiliki mereka yang kuat (kalangan elite), namun juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kalangan bawah.

Modal sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari barang umum yang diciptakan sehingga dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi mereka yang berusaha mewujudkannya, tetapi juga bagi mereka yang merupakan bagian dari suatu struktur (Coleman dalam Field, 2018). Coleman menyoroti perbedaan signifikan antara modal sosial dan modal fisik. Modal fisik, seperti halnya modal finansial dan modal manusia (*human capital*) hanya dapat menjadi aset atau harta *private* (*private good*) karena masing-masing individu dapat menginvestasikannya sebagai aset pribadi untuk memperoleh keuntungan. Insentif yang diperoleh dari investasi modal fisik bergantung pada kemampuan individu dalam memanfaatkan dan menciptakan peluang yang ada di sekitarnya sehingga hasilnya dapat diperoleh bagi dirinya sendiri secara maksimal dalam artian insentif modal fisik ada pada kendali individu (*a person*). Sementara itu, modal sosial merupakan aset yang

melekat pada sejumlah orang (aktor). Berdasarkan pernyataan tersebut, modal sosial dikategorikan sebagai harta publik (*public goods*).

Tabel 2. 2 Perbedaan Modal Sosial dan Modal Fisik

<b>Perbedaan</b>	<b>Modal Sosial</b>	<b>Modal Fisik</b>
Wujud	Sumber daya yang melekat pada jalinan relasi sejumlah orang atau kelompok.	Memiliki wujud fisik, seperti uang, jumlah tenaga manusia, dan sebagainya.
Subjek Pengguna	Individu sebagai aktor.	Sejumlah orang.
Pemerolehan Insentif	Bergantung pada kepiwaan aktor dalam memanfaatkan peluang.	Bergantung pada kekuatan para aktor dalam mengembangkan relasi.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi para aktor melalui hubungan sosialnya. Hal ini mencakup berbagai entitas yang secara keseluruhan terdiri dari berbagai aspek struktur sosial yang memfasilitasi tindakan para aktor. Maka dari itu, tindakan kolektif seperti kerja sama antara para aktor memiliki fungsi penting dalam proses merealisasikan manfaat modal sosial.

Pemikiran Coleman tentang modal sosial dikembangkan melalui karya besarnya yang berjudul “Foundations of Social Theory”. Dalam buku tersebut Coleman mengatakan antara lain bahwa modal sosial, seperti halnya modal ekonomi, juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal lainnya, seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak selalu memberi manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Suatu bentuk modal sosial bisa

bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian.

### 3. Robert Putnam

Robert Putnam merupakan seorang pakar Ilmu Politik dari Amerika, yang mendefinisikan modal sosial sebagai “*Features of social organisation, such as trust, norms, and networks, than can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions*”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa modal sosial dalam pandangan Putnam merupakan suatu karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jejaring atau jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi aksi-aksi yang terkoordinasikan. Definisi Putnam mengenai modal sosial tersebut mengandung tiga elemen modal sosial menurut Putnam, yaitu: rasa saling percaya (*trust*), norma yang disetujui (*norms*), dan jaringan (*networking*). Rasa saling percaya (*trust*) dapat menjadi perekat bagi individu dalam memanfaatkan modal sosialnya, sementara dalam berbagai interaksi diperlukan norma-norma yang disetujui untuk dapat mengatur interaksi dan hubungan yang baik antar setiap individu. Jaringan yang dapat terjalin dengan baik juga merupakan elemen penting bagi terciptanya modal sosial yang kuat dan memiliki kebermanfaatan tinggi.

Putnam memperkenalkan bentuk dasar modal sosial yang terdiri dari modal sosial *bridging*, yaitu modal sosial yang menjembatani (inklusif) serta modal sosial *bonding* yang mengikat (eksklusif).

- a. Modal sosial *bonding*
- b. Modal sosial *bridging*

Modal sosial *bonding* (*bonding social capital*) merupakan modal sosial yang cenderung mendorong identitas eksklusif untuk mempertahankan homogenitas. Modal sosial *bonding* merupakan bentuk dasar modal sosial yang baik untuk memobilisasi solidaritas antar individu serta menopang tindakan saling menguntungkan antar anggota dalam suatu komunitas atau masyarakat. Sementara itu, modal sosial *bridging* (*bridging social capital*) cenderung mempersatukan berbagai individu dari beragam ranah sosial untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam suatu relasi dan ruang sosial. Modal sosial *bridging* merupakan bentuk dasar modal sosial yang berperan baik dalam memperoleh dan saling menghubungkan aset-aset eksternal melalui upaya membangun relasi sehingga mampu membangun resiprositas yang lebih luas.

#### 4. Fukuyama

Francis Fukuyama, seorang pakar sosiologi Amerika keturunan Jepang kelahiran Chicago yang dikenal dalam teori modal sosialnya yang menekankan rasa saling percaya (*trust*) sebagai elemen yang mendasari terbentuknya modal sosial yang kuat dan memiliki kebermanfaatan tinggi. *Trust* juga dapat menjadi alat ukur seberapa besar modal sosial yang dimiliki suatu kelompok atau masyarakat. Pendapat Fukuyama ini bertolak belakang dengan pandangan para ahli sebelumnya yang lebih menyoroti besar kecilnya modal sosial bergantung pada jaringan atau relasi yang dapat dibentuk oleh para aktor. Rasa saling percaya yang tinggi tersebut kemudian dapat menjadi landasan bagi para aktor untuk memperoleh keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan kolektif. Fukuyama berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas

membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan.

Pandangan Fukuyama mengenai modal sosial diberikan dalam pernyataan:

*What is needed in these cases (where social capital is low) is to increase the radius of trust among individuals in the various small, inward looking groups that comprise these societies, and to facilitate the building of cooperative relationships, in both economic and political spheres, between groups that typically have had little to do with one another.*

Rasa saling percaya menjadi poin utama dalam mengetahui seberapa besar modal sosial di antara masyarakat. *Trust*, menurut pendapat Fukuyama, dapat terus dibangun dan ditingkatkan untuk memfasilitasi pembangunan hubungan kerja sama, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, antara kelompok yang biasanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Pernyataan Fukuyana tersebut setidaknya memiliki dua hal penting.

- a. Pertama, ruang ekonomi dan politik pada level makro memiliki kontribusi penting bagi pengembangan modal sosial. Ruang tersebut boleh jadi tidak bersentuhan langsung dengan interaksi sosial di antara aktor-aktor dalam menanamkan *trust* dan melakukan transaksi-transaksi yang saling menguntungkan dalam jaringan sosial yang mereka kembangkan, namun sangat menentukan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dalam menanamkan *trust* dan melakukan transaksi-transaksi sosial tersebut.
- b. Kedua, ketika modal sosial yang dimiliki suatu kelompok melemah, maka dapat digerakkan dengan aktor-aktor lain di luar kelompoknya. Dengan kata



lain modal sosial yang semula merupakan bonding social capital bergeser menjadi *bridging social capital* (Fukuyama dalam Usman, 2018).

Konsep modal sosial, menurut Fukuyama, memiliki tiga konsep penting. Pertama, adanya nilai dan norma sebagai pra-kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya kepercayaan (*trust*). Kedua, adanya kepercayaan (*trust*) yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa besar modal sosial yang dimiliki oleh satu kelompok. Ketiga, jaringan sosial yang berfungsi dalam menciptakan kepercayaan melalui interaksi dan berbagai informasi sesama anggota kelompok masyarakat (Fukuyama dalam Subagyo, 2021).

Bentuk modal sosial menurut Fukuyama terbagi atas tiga bentuk: bonding social capital, *bridging social capital*, dan linking social capital.

- a. *Bonding social capital*
- b. *Bridging social capital*
- c. *Linking social capital* (Usman, 2018).

*Bonding social capital* dipandang merupakan bentuk yang paling dasar karena relasi yang terjalin dalam kelompok bersifat homogen. *Bonding social capital* mendasari anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara kolektif untuk kepentingan bersama karena kekuatan identitas yang serupa (homogen). *Bridging social capital*, bersifat lebih berkembang dan inklusif karena memperluas kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan akses terhadap sumber daya. Maka dari itu, *bridging social capital* dipandang Fukuyama sebagai aset berharga karena memungkinkan untuk mengakses sumber daya dari berbagai pihak meskipun terdapat berbagai perbedaan. Sementara itu, *linking social capital* merupakan bentuk modal sosial paling kompleks karena melibatkan berbagai pihak dengan perbedaan strata, baik dalam aspek kekuasaan, status, maupun kekayaan.

Fukuyama melihat *linking social capital* sebagai modal sosial yang sangat luas dan kompleks karena bukan hanya melihat dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, melainkan juga aspek politik.

#### 2.2.1.2 Elemen Modal Sosial

Sunyoto Usman (2018) membagi elemen modal sosial ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi.

##### 1. Dimensi Struktural

Elemen-elemen pada dimensi struktural muncul dipengaruhi oleh berbagai tindakan para aktor. Hubungan yang terjalin antara para aktor dan berbagai elemen struktural modal sosial bersifat interdependensi (timbang balik dan saling menguntungkan). Pada satu pihak, elemen-elemen tersebut berkembang dari serangkaian tindakan para aktor yang muncul dari berbagai kepentingan. Sementara di lain pihak, elemen struktural tersebut juga menciptakan serangkaian tindakan para aktor.

- a. Ikatan Sosial
- b. Jejaring
- c. Masyarakat Jejaring

Modal sosial dikembangkan melalui pembentukan (kreasi) dan pemeliharaan ikatan sosial. Ikatan sosial lazim diwarnai oleh tindakan para aktor yang selalu mengupayakan sumber daya yang dimiliki agar tetap ada atau meningkat. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa modal sosial itu sendiri maupun berbagai bentuk aset lainnya, seperti modal finansial yang dapat dibangun melalui modal sosial yang dilatarbelakangi oleh ikatan sosial yang kuat. Modal sosial sendiri dapat dikembangkan melalui pembentukan dan pemeliharaan ikatan sosial.

Burt mengkategorisasikan jejaring ke dalam dua kategori, yaitu *structural holes* atau jejaring yang ditandai oleh peran penghubung atau jembatan (*broker*) dan *network closure* atau jejaring yang ditandai oleh interkoneksi antar aktor yang amat kuat (tanpa *broker*). Dua kategori tersebut pada dasarnya sama-sama berupa refleksi tindakan para aktor dalam membentuk relasi sosial.

Jejaring penting dalam pemerolehan informasi yang dapat bermanfaat bagi aktor sebagai individu maupun aktor-aktor dalam kelompok sosial. Para aktor yang saling terhubung dan berelasi pada satu jejaring yang sama cenderung memiliki akses yang sama dalam perolehan informasi, manfaat, maupun dalam mematuhi norma dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Masyarakat jejaring dapat ditinjau dari dua pendapat ahli, yaitu Jurgen Habermas dan Manuel Castells. Habermas cenderung melihat masyarakat modern sebagai masyarakat jejaring yang memiliki banyak tegangan (tensi) karena banyaknya hubungan yang dilatarbelakangi oleh upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan (Usman, 2018).

## 2. Dimensi Kultural

### a. *Social Trust*

*Trust* yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kelompok, komunitas atau masyarakat tidak terjadi secara kebetulan atau terbentuk mendadak tiba-tiba. *Trust* terjadi melalui hubungan yang melibatkan para aktor yang terhimpun dalam kelompok. Pada pembahasan mengenai *trust*, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: belief (keyakinan), *trustor* (pihak yang menaruh kepercayaan),

dan *trustee* (pihak yang dipercaya). Herreos menyatakan bahwa *trust* dapat terjadi karena kondisi-kondisi berikut.

- 1) *Trust* terkait persepsi individual aktor terhadap aktor lain yang terhimpun dalam suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. *Trust* pada bentuk pertama ini berada pada bentuk *bridging network* karena melibatkan pihak ketiga beserta aspek partisipasi.
- 2) *Trust* terkait kemampuan individual aktor memahami nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terendap dalam kelompok, komunitas, dan masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang berlaku berperan sebagai pengikat dan pedoman para aktor dalam berperilaku.
- 3) *Trust* terkait dengan kemampuan melakukan transformasi nilai dan norma ke dalam kehidupan nyata. *Trust* pada bentuk ketiga ini dapat membantu *trustor* mengidentifikasi siapa aktor-aktor yang layak diberi kepercayaan.

b. Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial, di dalamnya terdapat berbagai bentuk relasi, seperti kerja sama dan sikap-sikap saling menguntungkan. Dalam pertukaran sosial, apa yang hendak diraih bukan hanya produk finansial, seperti kekayaan, melainkan reputasi dan kepercayaan.

### 2.2.2 *Bridging social capital*

1. Definisi *Bridging Social Capital*

*Bridging social capital* adalah jenis modal sosial yang menggambarkan hubungan yang menghubungkan orang-orang melintasi belahan yang biasanya memisahkan masyarakat (seperti ras, atau kelas, atau agama). Ini adalah asosiasi

yang 'menjembatani' antara komunitas, kelompok, atau organisasi (Lancee, 2012). *Bridging social capital* menggambarkan hubungan pertukaran sosial, seringkali asosiasi antara orang-orang dengan minat atau tujuan yang sama tetapi membedakan identitas sosial (Pelling dan High dalam Lancee, 2012).

*Bridging social capital* merupakan modal sosial yang berfokus ke luar, inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik, dan modal sosial yang dapat terlihat paling baik dalam penggambaran klasik masyarakat sipil (Putnam dalam Lancee, 2012). *Bridging social capital* dipupuk sebagian besar oleh keanggotaan dalam asosiasi yang mewakili masyarakat yang lebih besar. *Bridging social capital* menggambarkan ikatan horizontal yang membentuk kelompok masyarakat yang heterogen dengan latar belakang yang berbeda. Istilah menjembatani mengacu pada kemampuan jaringan untuk menciptakan 'jembatan' yang menghubungkan sektor-sektor masyarakat yang, jika tidak, tidak akan pernah bersentuhan. Klaim umum adalah bahwa *bridging social capital* memiliki efek positif pada difusi informasi dan kepercayaan, sehingga mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi. Sisi positif dari *bridging social capital* adalah bahwa hal tersebut mendorong kepercayaan di antara jaringan yang lebih perifer, hubungan, dan asosiasi para aktor dengan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi lingkungan mereka, dan ini berimplikasi pada kemampuan para aktor untuk melakukan upaya ke arah kemajuan (Lancee, 2012).

## 2. Prinsip *Bridging Social Capital*

*Bridging social capital* merupakan salah satu bentuk modal sosial (*social capital*) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani atau menyambung relasi

antar individu dan kelompok yang berbeda identitas asal. *Bridging social capital*, modal sosial yang menjembatani, berperan dalam menghubungkan individu dengan karakteristik (sosial, ekonomi, maupun demografis) yang beragam. Hasbullah (dalam Abdullah, 2013) menguraikan bahwa *bridging social capital* menghubungkan banyak pihak dalam kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama dengan prinsip sebagai berikut.

- a. Kebersamaan
- b. Kebebasan
- c. Nilai-Nilai Kemajemukan dan Kemanusiaan
- d. Keterbukaan dan Mandiri

Kebersamaan memiliki arti bahwa bentuk modal sosial dalam *bridging social capital* tidak dapat diperoleh individu sebagai entitas tunggal, melainkan hanya dapat diperoleh dengan adanya kegiatan dan upaya kolektif antar berbagai pihak. Kebebasan berarti bahwa segala aktivitas dan kegiatan para aktor dalam kelompok tidak dapat dipaksakan oleh satu sama lain. Para aktor tersebut bebas untuk saling memberikan upaya dalam meningkatkan aset dan sumber daya yang dimiliki. *Bridging social capital* terbentuk dari berbagai relasi yang dibangun oleh para aktor yang meyakini nilai serta tujuan yang sama. Keberagaman dan kemajemukan tidak dapat dicegah apabila telah terbentuk relasi dalam modal sosial. Keterbukaan dari para aktor yang terlibat hubungan dan segala kegiatan kolektif dibutuhkan dalam hubungan pada *bridging social capital*. Keterbukaan terhadap segala informasi dan kemungkinan yang didapatkan memungkinkan adanya pertukaran ide serta gagasan yang memungkinkan masing-masing kelompok mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. *Social bridging* memungkinkan penyebaran jaringan dan akses terhadap sumber daya dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya secara maksimal. Oleh

karena itu, keterbukaan harus hal yang disadari masing-masing pihak yang menjalin relasi.

### 3. Manfaat *Bridging Social Capital*

Manfaat *bridging social capital* sangat luas dan dapat mencakup peningkatan kemampuan untuk mengumpulkan informasi, mendapatkan akses, meningkatkan toleransi dan penerimaan pihak lain, maupun memperluas jaringan dan peluang organisasi berkembang (Claridge, 2018). Berikut manfaat modal sosial yang dirumuskan Claridge dari berbagai teori mengenai *bridging social capital*.

- a. Meningkatkan peluang dalam mengumpulkan informasi dari berbagai pihak melalui relasi hubungan eksternal.
- b. Mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan akses pada kekuasaan atau penempatan yang lebih baik dalam jaringan
- c. Meningkatkan kemampuan untuk mengenali peluang baru dengan lebih baik melalui kerja sama dan kolaborasi antar kelompok.
- d. Meningkatkan toleransi dan penerimaan orang, nilai, dan kepercayaan yang berbeda melalui kontak dengan orang lain yang beragam karena *bridging social capital* melintasi batas-batas sosial, hal itu cenderung meningkatkan toleransi dan penerimaan orang, nilai, dan kepercayaan yang berbeda melalui kontak dengan orang lain yang beragam.
- e. Memungkinkan kelompok yang berbeda untuk berbagi dan bertukar informasi, ide dan inovasi dan membangun konsensus di antara kelompok yang mewakili kepentingan yang beragam. Jaringan yang tumpang tindih dapat membuat sumber daya dan peluang yang ada di satu jaringan dapat diakses oleh anggota jaringan lainnya.
- f. Menjadi pelumas sosial dan berpotensi bekerja sebagai motivasi anggota pada kelompok sosial untuk semakin berkembang melalui kegiatan dan komunikasi kelompok untuk membantu anggota berkembang.

### 4. Aspek *Bridging Social Capital*

Aspek dalam modal sosial, menurut Lancee (2012), pada buku “Immigrant Performance in the Labour Market: Bonding and *Bridging Social Capital*”, aspek pada modal sosial *bridging (bridging social capital)* terbagi dalam dua aspek: *structural bridging social capital* dan *cognitive bridging social capital*.

a. *Structural bridging social capital*

*Structural bridging social capital* mengacu pada kumpulan ikatan yang membentuk jaringan sosial 'luas' individu. Jaringan sosial yang luas adalah jaringan yang memiliki lubang struktural (*structural hole*) (Burt 1992, 2001). Menurut Burt (2001: 31):

argumen lubang struktural adalah bahwa modal sosial diciptakan oleh sebuah jaringan di mana orang dapat menengahi hubungan antara segmen-segmen yang terputus. Lubang struktural memisahkan sumber informasi yang tidak berlebihan, sumber yang lebih aditif daripada tumpang tindih.

Lubang struktural adalah celah dalam jaringan yang memberikan peluang untuk menengahi arus informasi antar orang atau kelompok; oleh karena itu mereka menciptakan keuntungan bagi individu yang hubungannya dapat mengisi (menjangkau) kekosongan lubang. *Bridging* adalah ikatan yang membentang di antara lubang struktural. Keuntungan dari ikatan penghubung adalah bahwa informasi dan berbagai peluang yang bervariasi akan dapat dijangkau (Putnam dalam Lancee, 2012). Menurut Burt (2004), mereka yang ditempatkan di dekat lubang struktural dalam struktur jaringan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memiliki inovasi': orang yang terhubung lintas kelompok lebih sering dihadapkan pada cara berpikir yang beragam, yang memberi lebih banyak pilihan maupun solusi dalam memecahkan masalah maupun memperluas akses terhadap sumber daya. Dalam sebagian besar studi empiris, tidak ada informasi jaringan konklusif yang tersedia. Akibatnya, menurut Marsden, *structural hole* tidak dapat diamati secara langsung (Marsden, 1990). Karena hanya sebagian dari jaringan sosial ego



yang diukur, tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat ikatan mana dari lubang struktural rentang ego.

Lubang struktural (*structural hole*) terdiri dari kesenjangan antar kategori sosial-ekonomi yang relevan seperti misalnya kelompok etnis dan usia (Portes dan Narayan dalam Lancee 2012). Ikatan yang melintasi kategori sosio-ekonomi ini dapat dianggap sebagai proksi untuk ikatan yang merentang celah struktural. Misalnya, jika ego melaporkan memiliki ikatan antaretnis, ini menunjukkan kapasitas untuk merentangkan lubang struktural antara unsur-unsur kategori 'kelompok etnis' yang sebelumnya terputus.

Wuthnow membedakan dua jenis ikatan penghubung: identitas dan status (Lancee, 2012).

- 1) *Identity* (identitas)
- 2) Status

*Identity* (identitas) mengacu pada ikatan yang menjangkau perbedaan secara horizontal yang didefinisikan secara budaya, seperti identitas etnis dan asal daerah atau dalam organisasi dapat berupa perbedaan budaya organisasi (Lancee, 2012). Budaya organisasi dinilai mencerminkan identitas dari suatu organisasi, kelompok, maupun komunitas dalam masyarakat yang dapat dilihat melalui berbagai nilai dan prinsip yang dianut dan disepakati para anggota. Zainudin dalam bukunya yang berjudul "Perilaku Organisasi" memberikan definisi tentang budaya organisasi sebagai berikut:

budaya organisasi merupakan perangkat sistem nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*) atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Budaya organisasi

merupakan seperangkat nilai atau norma yang berlaku relatif lama sehingga dianut bersama oleh para anggota dan digunakan sebagai pemecahan masalah.

Budaya organisasi mencerminkan identitas dari organisasi melalui cerminan nilai, prinsip, maupun asumsi yang menjadi kesepakatan bersama oleh para anggota. Dalam *bridging social capital*, adanya pemahaman dalam perbedaan budaya organisasi yang dimiliki masing-masing pihak dalam relasi *bridging social capital* dalam hal ini dapat membantu masing-masing pihak mengetahui, meninjau, kemudian mengadopsi nilai maupun prinsip yang berbeda agar dapat diterapkan dalam hal menjalin kerja sama maupun untuk meningkatkan internal organisasi.

Bagi para aktor dalam modal sosial *bridging*, penting untuk dapat menciptakan jejaring yang lebih luas dengan komunitas dengan perbedaan nilai, budaya, maupun lokasi daerah. Dengan adanya *bridging*, jaringan dapat lebih luas karena memperkaya jejaring dan sumber daya dari berbagai jejaring yang terbentuk. Kearns memberikan definisi mengenai *social bridging* yang merupakan relasi-relasi sosial antar kelompok berbeda identitas asal yang cenderung memperkuat ikatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda identitas. Relasi antar kelompok yang berbeda identitas asal menurut Kearns dapat dimaknai lebih luas seperti relasi antar sektor, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan, sektor ekonomi dan sosial atau relasi antar organisasi, lembaga serta asosiasi. Pemaknaan kelompok yang lebih luas tersebut menjadi kekuatan yang dapat digunakan oleh setiap individu untuk mengaksesnya, tergantung pada kepentingan kebutuhan yang akan dicapai oleh masing-masing. Pola-pola interaksi dan jaringan yang terbentuk dalam *bridging social capital* dibentuk dengan semangat dan sikap untuk saling bekerja

dan memberi keuntungan dalam lingkup nilai dan budaya organisasi yang dianut masing-masing pihak.

Sementara *identity* menekankan pada hubungan dan jejaring horizontal, pada *status-bridging social capital* menekankan pada hubungan vertikal. Aspek status merupakan ikatan yang menghubungkan secara vertikal dilihat dari kekuasaan, kekayaan, dan prestise. *Status-bridging* menunjukkan kemungkinan bagi mereka yang kurang berpengaruh untuk memperoleh pengaruh dan sumber daya lain melalui hubungan mereka dengan individu, kelompok, organisasi, maupun institusi dengan status lebih tinggi. Memiliki ikatan *social bridging* dari status bermanfaat pada aspek ekonomi, misalnya mendapatkan pekerjaan atau kenaikan posisi secara ekonomi (Wuthnow 2002; Granovetter 1973). Semakin kuat hubungannya, semakin besar kemungkinan pembagian dan pertukaran sumber daya (Lin 2001b: 66).

Berdasarkan penjelasan tentang aspek *structural* pada modal sosial *bridging* yang telah dikemukakan oleh Bram Lancee di atas, dapat dilihat perbedaan antara komponen *status-bridging social capital* dan *identity-bridging capital* sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Perbedaan Komponen Structural *Bridging Social Capital*

	<b>Identity</b>	<b>Status</b>
<b>Bentuk Hubungan</b>	Horizontal, melibatkan perbedaan asal daerah, nilai dan budaya organisasi serta fokus bidang organisasi.	Vertikal, fokus pada perbedaan tingkat kekuasaan dan prestise.
<b>Tujuan dan Manfaat</b>	Menciptakan jaringan sosial antar pihak yang lebih luas dengan	Memperoleh peluang dan akses sumber daya melalui perilaku saling

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

	sumber daya yang lebih beragam.	menguntungkan dan hubungan yang bersifat resiprositas.
--	---------------------------------	--

b. *Cognitive bridging social capital*

Komponen kognitif, menurut Lancee, dapat dilihat pada komponen *trust* yang terdapat pada relasi dan hubungan antar pihak dalam *bridging social capital*. *Trust* mengacu pada sikap dan nilai-nilai seperti: persepsi dukungan, timbal balik, dan kepercayaan yang berkontribusi pada pertukaran sumber daya (Poortinga: 2006 dalam Lancee, 2012). *Trust* menjadi komponen utama pada modal sosial menurut beberapa ahli, misalnya Putnam dan Fukuyama. Dalam hal ini, *trust* sebagai aspek kognitif melibatkan keyakinan atau kepercayaan (*belief*) dalam kemampuan individu dalam kelompok atau organisasi, sistem, dan prinsip (Veenstra dalam Lancee, 2012). Modal sosial *bridging* pada aspek kognitif dapat digambarkan sebagai kepercayaan, yaitu sikap dan nilai pada orientasi ke luar (hubungan eksternal) yang berkontribusi dalam pertukaran sumber daya dalam jaringan sosial yang luas pada *bridging social capital*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen *trust* dalam *cognitive bridging social capital* antara lain sebagai berikut.

1. Dukungan (*support*), yang diberikan oleh masing-masing pihak secara sukarela atas dasar keeratan hubungan yang telah dibentuk
2. Hubungan timbal balik, pemerolehan manfaat berikut risiko yang dapat terjadi tidak hanya dirasakan dan diperoleh satu pihak, melainkan seluruh pihak yang menjalin relasi dan kerja sama.

3. Keyakinan atas kemampuan internal serta eksternal dalam mengelola kerja sama dan memperluas akses terhadap sumber daya.

*Bridging social capital* dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu: *structural* dan *cognitive bridging social capital*. Mengacu pada pendapat Lancee, maka dapat diketahui penjabaran aspek *structural* dan *cognitive* pada *bridging social capital* sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Aspek *Bridging Social Capital*

Variabel	Aspek	Komponen	Indikator
<i>Bridging Social Capital</i>	Structural	1. Identity (hubungan horizontal)	1. Nilai 2. Budaya organisasi
		2. Status (hubungan vertikal)	1. Akses dalam pertukaran informasi 2. Perluasan jejaring
	Cognitive	<i>Trust</i>	1. Solidaritas antar pihak 2. Dukungan ( <i>support</i> ) 3. Hubungan timbal balik 4. Keyakinan akan kemampuan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

### 2.2.3 Organisasi Kepemudaan

#### 2.2.3.1 Tinjauan tentang Pemuda

Pemuda merupakan aktor kunci bagi peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah. Pemuda dapat memberikan kontribusi melalui peran-perannya di masyarakat. Perubahan demi perubahan yang terjadi di masyarakat global maupun Indonesia bisa dipastikan melibatkan pemuda sebagai pelaku utamanya, Widhyharto dan Adiputra, (2014) dalam Azca, Widhyharto, dan Sutopo, (2014).

Selanjutnya, Naaf dan White (2012) mendiskusikan pemuda dapat dibagi kedalam tiga perspektif, yakni pemuda sebagai generasi, pemuda sebagai transisi, dan pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya.

Pertama, kaum muda dalam pendekatan generasi mengingatkan kita bahwa setiap generasikaum muda memiliki sisi historis dan konteksnya masing-masing. Kemudian Parker dan Nilan (2013) dalam Azca, Widhyharto, & Sutopo (2014) menyatakan konstruksi terhadap kaum muda tidaklah sama dari waktu ke waktu, kondisi ini menjadikan makna kaum muda tersebut mengalami perubahan. Misalnya, kaum muda dalam masa kolonial memiliki makna politik sebagai agen perubahan kala itu, namun pada saat orde baru dan reformasi makna kaum muda lebih dimaknai sebagai agen konsumsi.

Kedua, kaum muda sebagai transisi, dianggap sebagai pendekatan deterministik yang meyakini bahwa kaum muda mengalami tahapan kehidupan yang bersifat tetap dan universal (Sutopo, 2014). Pandangan ini selaras dengan konsep fungsionalisme yang menegaskan berbagi peran untuk mewujudkan keseimbangan. Pandangan tersebut telah menciptakan argumentasi bahwa transisi kaum muda yang menekankan pada asumsi biologis dan psikososial terhadap perkembangan kemudian berakibat pada ketergantungan legitimasi dan intervensi kaum dewasa untuk memastikan bahwa kaum muda melewati jalur yang sesuai dengan yang konstruksi dan defisiensi yang telah dilampaui sebelumnya oleh kaum dewasa. Misalnya, perjuangan aktivisme politik antara angkatan 45, angkatan 66, dan angkatan 98 (Sutopo, 2014).

Ketiga, kaum muda sebagai pencipta dan konsumen budaya. Luvaas (2009) menjelaskan mengenai terinternalisasinya kaum muda terhadap nilai globalisasi, misalnya fenomena *do it yourself culture* dalam dunia kaum muda, sehingga memunculkan distro, musik indie, zinc, dll. Studi yang lain, Nilan (2006) menjelaskan mengenai interseksi antara budaya lokal dan global, sehingga memunculkan budaya hybrid diantara kaum muda Muslim di Indonesia (Luvass, 2009 & Nilan, 2006 dalam Widhyharto, 2014). Hal ini juga sebagai bagian dari strategi kaum muda untuk menghadapi derasnya arus globalisasi, sekaligus menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi agensi budaya yang memilah dan memilah secara kritis. Ketiga pandangan tersebut menegaskan dinamika kaum muda dalam merespons perubahan.

Sementara itu, konsep kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda, menurut UU No. 40 Tahun 2009 Pasal 1 adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pemuda dipandang sebagai sosok yang berkarakter serta memiliki kebutuhan aktualisasi diri yang nyata. Maka dari itu, dalam perkembangannya, pemuda harus diberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam mengembangkan kapasitas diri serta potensi yang bertujuan bagi pengembangan kualitas hidup diri pemuda serta wilayah sekitarnya. Para pemuda memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut.

1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara
2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum
5. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan ketahanan budaya nasional
7. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa

#### 2.2.3.2 Tinjauan tentang Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi diri serta pembentukan karakter melalui berbagai aktivitas di dalamnya yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Upaya-upaya dalam memberikan kesempatan pemuda untuk berpartisipasi bukan hanya merupakan kewajiban masyarakat, namun juga pemerintah setempat. Tujuan utama dari upaya tersebut pemuda adalah untuk memberikan pengalaman kepemimpinan kepada kaum pemuda sebelum nantinya berperan dan berkontribusi langsung bagi masyarakat (Sean, 2016).

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat (Warastuti, 2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah bagi pengembangan potensi-potensi pemuda. Organisasi kepemudaan, menurut UU No. 40 Tahun 2009 memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut.

1. Mendukung kepentingan nasional
2. Memberdayakan potensi yang dimiliki di wilayah sekitar
3. Mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan

Para pemuda, melalui organisasi kepemudaan, dapat ikut andil dalam berbagai bidang, misalnya pada bidang politik dan ekonomi (Saputra, 2021).



1. Pada bidang ekonomi, organisasi kepemudaan harus mampu memberikan kesadaran bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus memperhatikan asas keadilan, kebermanfaatan, efektifitas, efisiensi dan kelestarian alam sehingga kegiatan ekonomi tidak merusak alam yang merugikan kehidupan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang bersifat ekonomis baik hasil pertambangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan dan lainnya harus memperhatikan kebutuhan dan tidak bersifat destruktif sehingga merusak kelestarian alam. Pembangunan ekonomi harus mampu menjawab tantangan bagaimana memecahkan persoalan kesenjangan ekonomi antar daerah yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Pada tataran praktis, organisasi kepemudaan harus mampu mendorong partisipasi pemuda lainnya dengan menginisiasi sektor ekonomi berbasis rakyat kecil seperti koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun peluang bisnis lainnya di kalangan pemuda melalui proses kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk pelatihan maupun bantuan pendanaan kredit mikro.
2. Pada bidang politik, organisasi kepemudaan dapat mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sehat, kompetisi politik yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Dalam level kebijakan, organisasi kepemudaan dapat memberikan edukasi politik kepada pemuda mengenai pentingnya berpolitik sesuai kaidah hukum sehingga tercipta negara yang demokratis. Persaingan politik adalah sebuah keniscayaan, tapi dalam berkompetisi selalu mengedepankan kedewasaan dengan siap menang dan kalah, sehingga tidak terjebak dalam anarkisme yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam

memilih pemimpin politik baik pusat dan daerah dalam pilpres maupun pilkada serentak, organisasi kepemudaan harus mengajak pemuda lainnya untuk memilih pemimpin yang taat kepada hukum, mengedepankan hak asasi manusia, bersikap pluralisme dalam menyikapi heterogenitas bangsa dan berkomitmen penuh menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 2.2.4 Peningkatan Ekonomi melalui Modal Sosial dan Mobilitas Ekonomi

Perekonomian pada suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah innovator atau wiraswasta (entrepreneur). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) (Sukirno, 2002).

Modal sosial menurut penjelasan Granovetter penting dalam membangun aspek perekonomian melalui pemanfaatan jaringan dan relasi. Penelitian tersebut pertama kali dilakukan oleh Granovetter yang pada awalnya meneliti tentang bagaimana para pencari kerja dapat memanfaatkan hubungan yang kuat pada *bridging social capital* yang dimiliki untuk membantu menyalurkan kepada pasar kerja dan mengurangi pengangguran (Granovetter dalam Field, 2018).

Modal sosial sebagai aset dan sumber daya masyarakat dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Krishna

menyatakan bahwa peran modal sosial dalam pengembangan ekonomi dapat diidentifikasi dalam tiga level analisis, yaitu: pada level nasional, komunitas, dan individual (Field, 2018). Pada tingkat negara, sebuah negara dinyatakan memiliki modal sosial yang baik dan tinggi apabila institusi-institusi di dalamnya saling mengembangkan *trust* dan bekerja sama dalam satu jaringan yang saling menguntungkan satu sama lain. Pada level komunitas, modal sosial dikatakan dapat menjadi penggerak para anggota komunitas apabila dalam kegiatan-kegiatan komunitas para aktor di dalamnya saling menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Modal sosial sebagai aset komunitas misalnya dapat dilihat pada komunitas angkringan yang di dalamnya melembagakan *trust*, *reciprocal relationships*, dan *networking*. Oleh karena itu, meskipun mereka berada pada lingkup usaha kecil, tetapi memiliki daya ketahanan usaha yang baik meskipun terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya pada level individual, modal sosial biasa dikaitkan dengan mobilitas vertikal atau perubahan dari status rendah ke status tinggi. Relasi-relasi sosial yang terdapat *trust* di dalamnya tentu dapat mendorong mobilitas ke arah vertikal.

Modal sosial dan kemampuan meningkatkan perekonomian juga menjadi perhatian dari Foschi. Pembahasan Foschi mengenai hubungan antara keuangan mikro dan modal sosial di negara berkembang ke dalam tiga isu, yaitu terkait pasar di negara berkembang, perbedaan pendekatan modal sosial yang lazim dikembangkan untuk akses kredit mikro, dan berbagai kegiatan para pelaku usaha kredit mikro dari sisi dimensi sosial.

2.2.4.1 Pasar negara berkembang sering terjadi kepincangan informasi dan rendahnya transparansi. Kondisi tersebut menjadikan program-program pemerintah tidak sehat, sehingga tidak mampu menciptakan perkembangan ekonomi yang signifikan.

2.2.4.2 Perbedaan pendekatan modal sosial yang lazim dikembangkan untuk akses pada kredit mikro belum mampu dikembangkan dengan sama baiknya pada hubungan vertikal yang bersifat hierarkis antara pengelola dan peminjam dana.

2.2.4.3 Berbagai kegiatan para pelaku usaha kredit mikro dari sisi dimensi sosial berfokus pada pemberdayaan kelompok lapisan bawah. Pengguna kredit mikro menjadi klien yang harus dibantu, bukan hanya kelompok yang menjadi target memperoleh keuntungan ekonomi.

Sementara itu, Field memandang bahwa jaringan (*networking*) penting bagi keberhasilan bisnis (Field, 2018). Pada tahap awal perkembangan bisnis, jaringan yang terjalin dengan baik dapat mendatangkan berbagai informasi maupun keuntungan bagi para aktor penyelenggara. Dalam hal ini, jaringan yang mendasari terbentuknya modal sosial dipandang sebagai aset pasar dan tenaga kerja yang dapat memberikan banyak kontribusi (Bates dalam Field, 2018).

Hubungan dan relasi yang terjalin baik dan didasari kepercayaan (*trust*) antar berbagai pihak dapat membantu melindungi pelaku ekonomi mencegah kerentanan bisnis yang dapat terjadi, misalnya melalui kerja sama yang bersifat repositas (saling menguntungkan).

## 2.2.5 Modal Sosial *Bridging* dalam Pembedayaan Sosial

### 2.2.5.1 Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi aspek yang semakin penting, dan dianggap sebagai titik awal pembangunan daerah. Pemberdayaan seperti yang dinyatakan oleh Narayan dan Petesch (2002), 'proses peningkatan kemungkinan nyata bahwa individu atau kelompok dapat membuat dan mengekspresikan pilihan, dan mengubah pilihan mereka menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan'. Partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Fox dan Meyer (1995) penting karena mengorientasikan program pemerintah terhadap kebutuhan bersama, membangun dukungan publik dan mendorong rasa kepemilikan/kebersamaan dalam masyarakat. Andrews dan de Vries (2007) mengidentifikasi bahwa komunitas yang diberdayakan membutuhkan kesempatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berarti. Kemampuan sangat penting untuk mengatasi, mendefinisikan, menilai, dan bertindak atas masalah yang terkait dengan masyarakat (Laverack 2006).

#### 1. Definisi Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dalam masyarakat banyak dibicarakan sebagai kemampuan individu, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Istilah pemberdayaan mencontohkan proses ini, yang secara konkret memungkinkan orang untuk meningkatkan kemungkinannya untuk secara aktif mengontrol keberadaannya sendiri, dengan mengembangkan kemampuan yang berguna untuk memahami realitas sosial secara kritis serta mengadopsi strategi yang paling sesuai

dengan tujuan pribadi dan sosial (Serino, 2012). Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan dibahas dan dikaitkan langsung dengan partisipasi anggota masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini karena partisipasi merupakan tujuan dan esensi utama dalam proses pemberdayaan masyarakat (Asnarulkhadi; 2009). Secara lebih sederhana, pemberdayaan adalah pengakuan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki seseorang dalam kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki orang tentang konteks sosialnya sendiri yang selalu ditujukan pada tujuan pribadi dan sosial-politik. Dalam kerangka ini, individu bukanlah satu-satunya penerima intervensi pemberdayaan melainkan dia adalah karakter utama perubahan. Konsekuensinya, partisipasi adalah kesempatan untuk mengalami inklusi sehingga mengembangkan beberapa rangsangan yang dapat berguna untuk memulai proses perubahan pribadi.

Berikut beberapa definisi tentang pemberdayaan sosial menurut beberapa ahli.

- a. Strategi pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan inklusi sosial. Pemberdayaan fokus pada tingkat individu sementara inklusi sosial membahas sistem atau tingkat kelembagaan. Inklusi sosial dianggap sebagai mekanisme penting yang mengatasi hambatan kelembagaan dan meningkatkan struktur kebijakan untuk membantu kelompok miskin dan terpinggirkan mengakses aset dan peluang pembangunan. Dalam lembaga pembangunan internasional saat ini berfokus pada strategi pembangunan berbasis komunitas *bottom up* secara partisipatif, dan menggeser penekanan mereka dari sentralisasi ke

konteks pengembangan masyarakat, pemberdayaan dianggap sebagai kekuatan untuk melakukan sesuatu secara individu atau kolektif (Bennet, 2002).

- b. Pemberdayaan merupakan sumber untuk menekan institusi dan pembuat kebijakan untuk mereformasi kebijakan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan memungkinkan orang miskin untuk dapat mengatasi hambatan yang memberikan kesempatan mereka memiliki akses terhadap peluang mata pencaharian baru (Saegaert, 2006).
- c. Pemberdayaan merupakan strategi untuk mengakomodasi masyarakat yang terpinggirkan dengan pendekatan desentralisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan ke tingkat lokal. Inisiatif berbasis masyarakat dan partisipatif diasumsikan dapat membantu warga untuk meningkatkan kemampuan dan tindakan kolektif yang dapat menghasilkan hasil pembangunan yang signifikan seperti akses kepada kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, serta penurunan eksklusi sosial dan ketidaksetaraan (Gutberlet 2009).
- d. Pemberdayaan adalah suatu proses yang memungkinkan orang (individu, organisasi, komunitas) untuk mengembangkan dan menerapkan tanggapan yang terorganisir terhadap keadaan yang mempengaruhi kehidupan tersebut (Gutierrez, Parsons, & Cox, 1998).

Berdasarkan definisi-definisi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang menekankan pada prinsip inklusivitas dalam membantu individu (warga secara individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat) mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai

tujuan hidup yang diinginkan dengan tindakan kolektif melalui partisipatif komponen masyarakat sekitar. Pemberdayaan dapat menjadi strategi untuk mengembangkan sumber daya yang tersedia dengan adanya partisipasi aktif masyarakat setempat.

## 2. Unsur-unsur Pemberdayaan

Pemberdayaan bukanlah pengalaman yang statis, satu kali, melainkan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Peningkatan kapasitas masyarakat membantu masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal secara swadaya. Laverack (2001) melaporkan tiga elemen pemberdayaan. Unsur-unsur tersebut adalah: partisipasi masyarakat, kapasitas organisasi lokal dan akuntabilitas.

### a. Akuntabilitas

Laverack menjelaskan keterkaitan antara pemberdayaan, partisipasi dan kepemimpinan. Dalam konteks kebijakan sosial, pemberdayaan merupakan sumber untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sedangkan partisipasi memungkinkan masyarakat yang diberdayakan melakukan tindakan yang meningkatkan kualitas hidup mereka (Sidorenko 2006). Hasil pemberdayaan dapat dimanipulasi pada penyelesaian proyek dan dapat mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan termasuk keputusan ekonomi, politik dan kelembagaan. Pemberdayaan merupakan sumber perlawanan terhadap segala faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat.

### b. Peningkatan Kapasitas Organisasi Lokal

Alsop dan Heinsohn (2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses yang meningkatkan kapasitas individu atau kelompok sehingga mereka dapat



membuat pilihan mereka sendiri dan mengubah pilihan yang diinginkan menjadi tindakan dan hasil yang menguntungkan. Peningkatan kapasitas adalah persyaratan mendasar untuk membuat pilihan yang efektif. Tingkat pemberdayaan bervariasi dengan situasi dan tergantung pada ketersediaan, penggunaan dan pencapaian pilihan.

c. Partisipasi

Pemberdayaan masyarakat bukanlah tindakan individu, melainkan membutuhkan tindakan pengumpulan masyarakat dan keterlibatan yang sama dari semua anggota masyarakat. Sebagaimana diilustrasikan oleh Narayan dan Petesch (2002) bahwa suatu komunitas dianggap berdaya jika mereka berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan, memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan memiliki akses informasi yang tepat waktu dan mudah dipahami. Bagian selanjutnya menyoroti masing-masing komponen dan kontribusinya dalam pembangunan pedesaan.

2.2.5.2 Langkah-langkah Pemberdayaan

Reid (2002) mengemukakan beberapa langkah dan proses penerapan pendekatan pemberdayaan dalam pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Membangun Harapan

Langkah pertama dalam proses pemberdayaan adalah meningkatkan harga diri dan menghilangkan keputusasaan di antara anggota masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Sikap mudah putus asa dan kurang percaya diri dapat mengancam dan menghalangi mencapai tujuan dalam mewujudkan

kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, pelibatan tokoh masyarakat yang tinggi, disegani dan visioner yang mampu menggerakkan warga masyarakat untuk mengambil tindakan dapat dilakukan. Keiffer (1984) percaya bahwa tahap ini dianggap sebagai provokasi yang menciptakan kesadaran pada tahap awal proses pemberdayaan. Demikian pula di tingkat pemerintah, perlu diberikan kesempatan dan ruang untuk membangun harapan dan tekad yang tinggi dengan memberikan insentif dan inisiatif seperti membangun kompetisi atau program pembangunan. Dari situ, potensi masyarakat dapat dikembangkan untuk memastikan bahwa mereka mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengambil keputusan dalam program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan mereka.

## 2. Menumbuhkan Partisipasi secara Luas

Proses pemberdayaan dalam suatu program pengembangan masyarakat tidak akan berhasil jika hanya diikuti oleh pimpinan atau kelompok kecil atau pihak lain seperti kementerian, departemen, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta. Pemberdayaan membutuhkan partisipasi yang luas dari anggota, asosiasi atau komunitas.

## 3. Membangun Hubungan dengan Mitra

Tahap ini dikenal sebagai tahap kemajuan dalam proses pemberdayaan (Keiffer; 1984). Pada tahap ini masyarakat perlu menjalin hubungan baik dengan organisasi lain dan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan. Mitra-mitra ini diperlukan untuk membantu mengidentifikasi aset atau sumber daya dalam masyarakat dan membangun kapasitas kelembagaan untuk bergerak maju.

#### 4. Menciptakan Visi

Sebelum melaksanakan proses pembangunan, anggota masyarakat harus memiliki visi yang jelas untuk melihat arahnya. Langkah pertama dalam menciptakan visi adalah memulai dengan menilai kekuatan dan kelemahan kapasitas masyarakat. Penilaian sumber daya dilakukan dengan mengidentifikasi aset yang ada dan dilanjutkan dengan penilaian kemampuan masyarakat di masa yang akan datang. Berdasarkan penilaian tersebut, masyarakat akan membangun visi yang memiliki tujuan dan strategi pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Strategi dibangun berdasarkan hambatan atau permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat seperti tingginya angka kemiskinan, turunnya prestasi siswa, meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran dan sebagainya. Dari strategi-strategi tersebut, masyarakat akan menemukan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi penghambat proses perubahan.

#### 5. Menyusun Rencana Kerja

Langkah selanjutnya dalam proses pemberdayaan adalah menyusun rencana kerja. Rencana kerja bertindak sebagai peta jalan yang merupakan bagian dari persyaratan dasar untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Rencana kerja berisi petunjuk khusus untuk tindakan masyarakat, daftar jadwal kerja, tanggung jawab dan anggaran untuk program masyarakat. Rencana kerja berasal dari strategi yang diterjemahkan dalam bentuk tindakan atau tindakan tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berada pada jalur yang benar dan menghasilkan pencapaian yang berarti untuk mencapai tujuan

pembangunan masyarakat, masyarakat perlu menetapkan tolok ukur untuk mengukur keberhasilan dan menilai hasil pencapaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komunitas yang berdaya mampu menerapkan rencana kerja dan rencana yang dirancang sendiri sebagaimana dimaksud tanpa intervensi (Reid; 2002).

#### 6. Menemukan Sumber Daya

Setelah anggaran selesai, langkah selanjutnya adalah mencari sumber daya untuk mendukung implementasi rencana tersebut. Sumber daya seperti uang, keterampilan dan pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Misalnya, uang dapat diperoleh dalam berbagai bentuk seperti hibah, pinjaman, atau biaya keanggotaan. Namun yang terpenting dan harus menjadi fokus pada tahap ini adalah perencanaan harus dibuat berdasarkan sumber daya yang tersedia, dan tidak boleh diubah karena kekurangan atau kelebihan sumber daya.

#### 7. Menciptakan Kesuksesan

Mempertahankan momentum terutama pada fase implementasi sangatlah sulit. Kegagalan untuk melakukannya berarti akhir dari proses pemberdayaan bahkan sebelum selesai. Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan masyarakat tetap eksis, perlu diciptakan dan dimajukan kemenangan awal untuk meyakinkan warga masyarakat bahwa bukan tidak mungkin perubahan terjadi dengan usaha dan semangat yang gigih meskipun banyak tantangan dan rintangan.

#### 8. Mengembangkan Kapasitas Masyarakat (*Capacity Building*)

Penekanan utama dari rencana strategi dan rencana kerja adalah untuk menyoroti pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pemberdayaan, pengembangan kapasitas harus dikelola oleh anggota masyarakat itu sendiri dan bukan oleh organisasi luar dalam melakukan sesuatu untuk masyarakat. Pengembangan kapasitas berkelanjutan dalam suatu komunitas diperlukan untuk memastikan keberlanjutan proses pemberdayaan.

#### 9. Penyesuaian Rencana Strategi

Langkah selanjutnya dalam proses pemberdayaan adalah mengadaptasi rencana strategi. Untuk proyek atau program pembangunan yang keluar dari rencana, rencana strategi dianggap tidak sesuai dan tidak memenuhi tujuan dan sasaran program pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memeriksa dan mengkaji ulang tujuan dan strategi secara berkala, dan melakukan perubahan, jika diperlukan, pada tahap perencanaan. Proses meninjau rencana program termasuk melihat tingkat partisipasi anggota masyarakat, menilai pencapaian dan mengubah rencana strategi untuk memastikan bahwa pembangunan telah mencapai tujuan dan visi yang ditetapkan pada tahap awal.

#### 10. Pengembangan Menuju Keberlanjutan

Untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan, pembangunan harus bergerak menuju keberlanjutan. Proses pembangunan masyarakat tidak berhenti hanya dengan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Keberlanjutan dapat dicapai dengan berbagai cara seperti meningkatkan

kapasitas kepemimpinan komunitas, memungkinkan kemitraan antar organisasi, menunjuk anggota baru untuk terlibat dalam proses, membuat program peningkatan diri, dan melestarikan lingkungan ekologi, ekonomi dan sosial suatu komunitas. Proses pemberdayaan diukur tidak hanya berdasarkan hasil atau produk (yaitu jumlah rumah yang dibangun, lapangan kerja yang diciptakan atau penurunan tingkat kejahatan). Sebaliknya diukur dari kemampuan masyarakat untuk melanjutkan proses pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

#### 2.2.5.3 Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan dan Pembangunan Sosial

Ostrom (1993) menggunakan konsep modal sosial untuk menyoroiti fenomena pembangunan di Negara Dunia Ketiga. Dalam penelitian yang menggunakan konsep modal sosial ini, Ostrom menyebutkan bahwa pembangunan dengan menggunakan modal sosial menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik, sehingga ia menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan salah satu prasyarat keberhasilan suatu program pembangunan. Badaruddin, dkk. (2016) menyebutkan bahwa modal sosial yang kuat diwujudkan dalam bentuk asosiasi masyarakat, norma, kepercayaan dan jaringan di berbagai tingkatan. Terkait dengan fenomena organisasi, Rose (1999) dalam penelitiannya di Rusia menemukan bahwa modal sosial merupakan elemen kunci bagi bekerjanya organisasi informal di masyarakat sebagai alternatif dari organisasi formal. Temuan Rose menunjukkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan organisasi di masyarakat.

Pemberdayaan telah didefinisikan dalam banyak disiplin ilmu dengan berbagai cara. Literatur menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses

pembangunan sangat membantu untuk meningkatkan pengaruh sosial terhadap pelaku pembangunan dan dianggap sebagai sumber untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal (Corbett dan Keller 2004; Hjorth 2003; Wallerstein 2006; Terry et al. 2011). Speer dkk. (2001) menggambarkan proses pemberdayaan sebagai proses berkelanjutan internasional yang berpusat pada komunitas lokal, melibatkan upaya kolaboratif dan saling menguntungkan untuk mendapatkan kendali atas sumber daya dan informasi. Bennet (2002) melaporkan pemberdayaan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas dan aset komunitas lokal (individu maupun kelompok). Peningkatan kapasitas masyarakat tidak hanya membantu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga menjadi sumber untuk mempengaruhi keputusan lembaga lokal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada tingkat pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga komponen proses pemberdayaan yaitu bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan, pengelolaan sumber daya lokal dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Schulz et al. 1995; Zimmerman 2000). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan hubungan antara modal sosial dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat yang dapat mempermudah masyarakat mencapai tujuan kesejahteraan sebagai berikut.

1. Relasi dan jejaring merupakan kunci penting dalam upaya pembangunan daerah. Relasi yang luas memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah untuk dapat mengeksplorasi berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan. Semakin kuat relasi, maka proses pembangunan akan dapat berjalan secara berkelanjutan.

2. Modal sosial yang kuat merupakan kunci keberhasilan dalam membangun partisipasi masyarakat. Partisipasi sangat dibutuhkan dalam segala upaya pembangunan dan pemberdayaan untuk memastikan proses berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
3. Upaya kolaboratif diperlukan sebagai syarat melaksanakan pemberdayaan yang holistik bagi seluruh komponen masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Segala upaya yang dilakukan harus mampu melibatkan tokoh kunci serta pilar-pilar masyarakat untuk dapat berkolaborasi sekaligus menarik partisipasi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam upaya yang dilakukan.

#### 2.2.6 Relevansi Praktik Pekerjaan Sosial dan Modal Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki misi utama untuk memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Pekerja sosial memiliki misi utama untuk membantu menciptakan kondisi-kondisi bagi masyarakat yang dapat menunjang pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat (Zastrow, 2004 dalam Lestari, 2014). Profesi pekerja sosial memiliki tujuan untuk membantu orang memanfaatkan sumber daya sosial—anggota keluarga, teman, tetangga, organisasi masyarakat dan lembaga pelayanan sosial, dan sebagainya—untuk memecahkan masalah (Miley, dkk, 2012). Membantu individu untuk memanfaatkan sumber daya sosial serta mengembangkan dan memperkuat sumber daya ini dengan menyatukan orang-orang dalam kelompok dan organisasi, dengan pendidikan masyarakat, dan dengan pengembangan organisasi adalah salah satu fungsi utama dari praktik pekerjaan sosial. Definisi dari Miley tersebut cukup jelas



menyatakan bahwa tujuan pekerja sosial bukan hanya sekedar membantu individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat memecahkan masalah sosial, melainkan lebih dari itu untuk membantu memanfaatkan sumber daya sebagai alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

#### 2.2.6.1 Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Bourdieu mengemukakan bahwa modal sosial merupakan aset dan sumber daya bagi individu maupun kelompok berdasarkan adanya jaringan (*network*) serta hubungan timbal balik (*mutual acquitance*) yang terlembagakan (Bourdieu, 1986). Sementara Coleman memberi penjelasan tentang manfaat modal sosial yang dapat memfasilitasi para aktor dalam suatu struktur sosial untuk berkembang (Coleman, 1988). Modal termanifestasi pada hubungan, baik di dalam maupun luar, struktur sosial. Oleh karena itu, modal sosial terwujud berdasarkan adanya norma atau nilai yang terinstitusionalisasi, rasa saling percaya antar pihak yang berelasi, serta jejaring yang bertahan lama (*durable network*). Modal sosial, menurut Adler dan Kwon (2000) dalam Sarascoti (2007), memiliki dua unsur utama sebagai berikut.

1. Hubungan sosial yang memfasilitasi tindakan
2. Adanya strategi

Modal sosial merupakan sumber daya yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan termanifestasi pada relasi para aktor dalam suatu struktur sosial. Modal sosial berbeda dengan modal ekonomi (*economic capital*) maupun modal manusia (*human capital*) yang dapat dilihat dan diketahui langsung bagaimana rupa dan seberapa besar nilainya. Modal sosial (*social capital*) dapat dilihat dari para aktor yang saling berhubungan berdasarkan adanya nilai, norma, dan kepercayaan.

Oleh karena itu, Wodon mengemukakan, modal sosial hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila terdapat relasi dan kegiatan kolektif antar para aktor dalam mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai secara individual (Wodon dalam Sarascoti, 2007). Modal sosial yang tertanam dalam struktur sosial masyarakat sesuai pendapat Grootart dapat memfasilitasi tindakan terkoordinasi yang kemudian dapat memungkinkan hubungan horizontal maupun vertikal sehingga dapat membawa struktur sosial pada jejaring yang lebih luas berikut pula besaran manfaatnya (Grootaert dalam Sarascoti, 2007).

Unsur kedua dalam konsep modal sosial adalah adanya strategi. Seperti yang telah disebutkan oleh Wodon, modal sosial adalah jaringan hubungan horizontal dan norma-norma terkait yang memungkinkan dilakukannya aktivitas kolektif, maka modal sosial pasti melibatkan kerja sama antara anggota di dalam maupun luar kelompok. Strategi kemudian muncul dalam relasi-relasi modal sosial. Strategi untuk mengembangkan modal sosial, menurut Adler dan Kwon, terbagi menjadi dua: strategi pemberdayaan (*strategy of empowerment*) dan strategi asosiasi (*associativity*). Pertama, strategi pemberdayaan terdiri dari tindakan-tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kepemimpinan kelompok dan mobilitas sumber daya, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kedua, strategi asosiatif yang merupakan segala tindakan yang dirancang untuk memperluas atau memperkuat jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan berbeda: *bonding, bridging, linking*.

Konsep modal sosial melibatkan kerja sama berbagai aktor dan pihak-pihak dalam masyarakat melalui tindakan kolektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Apabila suatu kelompok atau komunitas tertentu ingin memperluas kekuatan dan kepemilikan aset, maka harus mampu memperluas jejaring dengan kelompok atau komunitas yang setara atau lebih tinggi. Sederhananya, kelompok belajar yang mempelajari bagaimana cara menjahit dan ingin mengembangkan kemampuan mengenai bagaimana menjual pakaian hasil menjahit mereka tentu harus mampu menjalin kontak dan membangun hubungan dengan kelompok usaha atau toko pakaian agar mampu memperoleh pendapatan dari hasil menjahit. Modal sosial berperan di dalam memajukan suatu kelompok, komunitas, bahkan masyarakat melalui berbagai relasi dan jejaring sehingga memperkaya sumber daya dan menambah aset untuk dapat berkembang.

#### 2.2.6.2 Modal Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial Makro

Pekerja sosial, dalam praktiknya, sesuai yang dijelaskan Rubin dan Rubin dapat menginisiasi munculnya modal sosial melalui aplikasi teknik pengembangan dan pengorganisasian masyarakat (*Community Organization/Community Development*). Teknik-teknik pekerja sosial makro mendefinisikan komunitas atau populasi sasaran, mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya dan masalah komunitas, memfasilitasi penetapan tujuan dan sasaran, memilih strategi yang efektif untuk aksi komunitas, mengimplementasikan program dan proyek, dan mengevaluasi hasil (Rubin dan Rubin, 1992). Pengorganisasian sosial oleh pekerja sosial bekerja dengan pemimpin lokal, kelompok sipil, kelompok usaha lokal, organisasi pemuda, serta pihak-pihak lain untuk membentuk dan memperkuat asosiasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat jaringan sosial, membantu warga mengembangkan rasa identitas, mendorong kolaborasi yang

efektif, dan menangani masalah sosial yang dimiliki masyarakat. Saat pekerja sosial komunitas bekerja dengan kelompok dalam masyarakat, mereka menyatukan anggota komunitas yang berbeda di sekitar kepentingan bersama dan dengan demikian meningkatkan jaringan dan pembentukan modal sosial. Dengan membangun koalisi di antara orang-orang dan organisasi dengan kepentingan yang berbeda, pekerja sosial komunitas menciptakan hubungan dan asosiasi sosial baru dan memperkuat partisipasi orang dalam urusan komunitas.

Pekerja sosial memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan modal sosial. Pekerja sosial bekerja dengan melibatkan masyarakat dari berbagai pihak. Dengan cara tersebut, pekerja sosial memfasilitasi terbentuknya modal sosial baik *bonding* maupun *bridging social capital* melalui penciptaan hubungan antar individu dari berbagai kelas sosial dan etnis yang berbeda. Pekerja sosial juga tak jarang membantu mengembalikan hak bagi individu, keluarga, maupun kelompok pada masyarakat yang tidak dapat terpenuhi dalam kehidupan sipil dengan menciptakan asosiasi yang mampu menghargai pandangan yang berbeda dan mengatasi masalah dalam masyarakat. Pekerjaan sosial dapat menguatkan asosiasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memfasilitasi perluasan jaringan, serta mengerahkan modal sosial menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai peran, antara lain sebagai berikut.

1. Enabler

Sebagai pendukung, pekerja sosial melibatkan individu, keluarga, dan kelompok kecil dalam proses konseling. Enabler mendorong tindakan dengan terlibat dalam hubungan membantu, membingkai solusi, dan bekerja untuk

perubahan yang konstruktif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, enabler adalah agen perubahan yang menggunakan berbagai pendekatan untuk menyediakan kondisi yang diperlukan bagi klien untuk mencapai tujuan mereka, menghadapi tantangan hidup, terlibat dalam proses perkembangan kehidupan alami mereka, dan melaksanakan tugas mereka (Maluccio, 1981: 19). Dalam konteks bekerja dengan kelompok, pekerja sosial memungkinkan interaksi yang mendukung antar anggota kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah. Sebagai pendukung, praktisi berkonsultasi dengan sistem klien individu dan keluarga untuk meningkatkan fungsi sosial dengan memodifikasi perilaku, pola hubungan, dan lingkungan sosial dan fisik.

## 2. Fasilitator

Fasilitator mengaktifkan partisipasi anggota organisasi dalam upaya perubahan. Dengan memfasilitasi proses kelompok, pekerja sosial mendorong fungsi kelompok yang kompeten, merangsang dukungan dalam kelompok, mengamati interaksi kelompok, menawarkan umpan balik yang konstruktif, dan berbagi informasi tentang dinamika kelompok. Sebagai fasilitator, pekerja sosial meningkatkan keterkaitan di dalam organisasi dan membantu mereka menangkalkan sikap apatis dan disorganisasi. Dalam peran ini, praktisi bahkan dapat menargetkan pengaturan lembaga mereka sendiri untuk meningkatkan kerjasama staf dan memastikan efektivitas penyampaian layanan sosial.

## 3. Broker

Menurut Thompson dan Thompson (2008), peran broker dalam pekerjaan sosial muncul sebagai konsekuensi dari perubahan yang dibawa oleh Undang-

undang NHS dan Komunitas 1990, khususnya perpecahan pembeli/penyedia.

Mereka menyatakan:

*One outcome of this change has been the creation of an added responsibility for many social workers, that of brokerage. The organizing of individualised packages of care in response to complex and unique needs requires someone to act as a broker ... Social workers find themselves having to deal with competing obligations: on the one hand, acting as advocates on behalf of disadvantaged people who find themselves in vulnerable circumstances, but also, on the other hand, as gatekeepers of limited resources ... (Thompson and Thompson, 2008, p. 166 dalam Scourfield, 2008).*

Salah satu hasil dari perubahan ini adalah terciptanya tanggung jawab tambahan bagi banyak pekerja sosial, yaitu perantara. Pengorganisasian paket perawatan individual sebagai respons terhadap kebutuhan yang kompleks dan unik membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai perantara ... . Pekerja sosial mendapati diri mereka harus berurusan dengan kewajiban yang bersaing: di satu sisi, bertindak sebagai advokat atas nama orang-orang yang kurang beruntung yang menemukan diri mereka dalam keadaan rentan, tetapi juga, di sisi lain, sebagai penjaga gerbang sumber daya yang terbatas ... (Thompson dan Thompson, 2008, hlm. 166 dalam Scourfield, 2008).

Pekerja sosial, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Thompson dapat berperan sebagai broker/advokat untuk memberikan rujukan untuk mengakses sumber daya maupun layanan yang akan membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, maupun masyarakat agar mampu memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pekerja sosial sebagai *broker* berperan dalam membantu anggota masyarakat mengakses sumber daya eksternal. Peran pekerja sosial sebagai *broker* tersebut tentu sejalur dengan pentingnya pembahasan mengenai modal sosial, utamanya dalam hal ini *bridging social capital* yang memberikan peluang bagi para aktor untuk memperoleh berbagai aset melalui hubungan eksternal dengan berbagai pihak.

### 2.2.6.3 Praktik Pekerjaan Sosial dalam Peningkatan Perekonomian Lokal

Seperti yang ditunjukkan oleh Blakely (1994), mereka yang peduli dengan pembangunan ekonomi menggunakan berbagai strategi untuk mempromosikan revitalisasi ekonomi masyarakat. Mereka berusaha untuk meregenerasi bisnis lokal atau mendorong bisnis baru untuk pindah ke masyarakat. Dalam kedua kasus, mereka peduli dengan pemasaran dan mengidentifikasi konsumen potensial. Mereka menargetkan konsumen lokal atau berusaha menarik konsumen ke masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Mereka juga mengeksport barang dan jasa yang diproduksi secara lokal kepada konsumen di luar masyarakat. Strategi ini dirancang untuk menghasilkan makan produksi ekonomi dalam masyarakat, untuk menciptakan lapangan kerja lokal, dan untuk meningkatkan standar hidup lokal.

Keberhasilan strategi ini bergantung pada faktor ekonomi dan sosial. Fasilitas manufaktur yang pindah ke komunitas miskin harus dapat mempekerjakan pekerja yang memiliki keterampilan dan komitmen untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Demikian pula, revitalisasi perusahaan lokal mengharuskan masyarakat lokal mendukung perusahaan tersebut. Tidak ada gunanya membuka toko kelontong lokal jika orang memilih untuk berbelanja di supermarket yang berlokasi di luar komunitas. Demikian pula, masyarakat dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan kemerosotan sosial yang nyata tidak mungkin menarik investasi eksternal.

Akan tetapi, penciptaan modal sosial hanyalah langkah pertama dalam mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Pekerja sosial tidak hanya harus mampu meningkatkan modal sosial tetapi juga harus mengarahkan modal sosial

secara khusus pada kegiatan ekonomi. Jaringan, asosiasi, dan kegiatan sipil yang mereka tingkatkan harus diarahkan pada tujuan ini. Ini paling baik dicapai ketika pekerja sosial berkolaborasi dengan perencana kota, pemimpin politik, dan anggota masyarakat lokal yang peduli dengan pembangunan ekonomi lokal. Korporasi pengembangan masyarakat adalah kendaraan utama untuk mempromosikan keterlibatan pembangunan yang efektif. Organisasi ini terdiri dari masyarakat lokal, perwakilan dari asosiasi lokal, dan pihak terkait lainnya; mereka adalah elemen penting dalam pembentukan modal sosial untuk pembangunan ekonomi lokal. Jika organisasi semacam itu belum ada, pekerja sosial dapat memberikan kontribusi penting dengan membantu mendirikan mereka. Jika organisasi semacam ini memang ada, pekerja sosial dapat terlibat aktif dalam mendukung dan memperkuat kegiatannya.

Selain meningkatkan dukungan dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal, pekerja sosial dapat menggunakan modal sosial untuk mendorong keterlibatan lokal yang lebih besar dalam pengembangan usaha kecil. Dengan bekerja sama dengan profesional lain, pekerja sosial dapat membantu menciptakan usaha baru dan memperkuat usaha yang sudah ada (Livemore, 1996). Pekerja sosial Dunia Ketiga telah memiliki pengalaman luas dalam bidang ini dan kegiatan mereka sekarang ditiru oleh pekerja sosial di negara-negara industri (Balkin, 1989; Else dan Raheim, 1992). Mereka dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong perempuan berpenghasilan rendah untuk memulai usaha mikro (Dignard dan Havet, 1995). Juga, pengetahuan dan keterampilan mereka dengan kelompok memberi mereka keterampilan khusus dalam mengembangkan usaha



koperasi. Penggunaan peer lending, misalnya, telah terbukti sebagai mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam usaha-usaha tersebut.

Seperti disebutkan sebelumnya, modal sosial melibatkan lebih dari penciptaan jaringan pribadi dan asosiasi sipil. Midgley (1995) dan Sherraden (1991) membahas cara-cara di mana pekerja sosial dapat mengarahkan modal sosial menuju tujuan pembangunan ekonomi. Seperti yang dicatat Midgley, pekerja sosial di negara-negara Dunia Ketiga memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan infrastruktur sosial di komunitas lokal. Midgley dan Simbi (1993) berpendapat bahwa pekerja sosial masyarakat di Amerika Serikat harus banyak belajar dari pengalaman rekan-rekan ini. Demikian pula, penelitian Sherraden untuk akumulasi aset memiliki relevansi langsung dengan keterlibatan pekerjaan sosial dalam pembangunan ekonomi lokal. Penciptaan rekening pembangunan individu (IDAs) di tingkat lokal dan promosi aset masyarakat juga mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Modal sosial juga dapat memberikan kontribusi tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi lokal. Misalnya, dampak perbaikan dari pembentukan modal sosial terhadap masalah masyarakat lokal seperti penyalahgunaan zat dan kejahatan akan meningkatkan pengembangan bisnis lokal. Di banyak komunitas, pertumbuhan usaha kecil terhambat oleh tingginya tingkat kejahatan dan masalah sosial lainnya. Pembangunan ekonomi lebih mungkin berhasil di daerah-daerah di mana masalah-masalah ini dikendalikan. Keberadaan asosiasi, klub, dan fasilitas lainnya yang berkembang dengan baik juga cenderung menarik investasi eksternal dan penduduk ke dalam komunitas yang mengalami revitalisasi. Modal sosial yang

meningkat juga meningkatkan hubungan sosial yang bermakna dan kepercayaan di antara orang-orang. Seperti disebutkan sebelumnya, penciptaan kepercayaan adalah komponen penting.

